



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 8 Juni 2017
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.30 WIB s.d 16.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas persiapan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka penanganan arus mudik Lebaran Tahun 2017.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Kakorlantas Polri beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kakorlantas Polri pada hari ini adalah membahas persiapan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka penanganan arus mudik Lebaran Tahun 2017.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kakorlantas Polri, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perhubungan selaku Koordinator penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Nasional tahun 2017 (1438 H) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri serta operator pengelola jasa transportasi nasional, untuk mempersiapkan Angkutan Lebaran secara lebih komprehensif, lebih mendetail dan lebih terukur, termasuk melakukan koordinasi terintegrasi untuk seluruh moda pada Angkutan Lebaran 2017, sehingga permasalahan Angkutan Lebaran yang terjadi sebelumnya tidak terulang.
2. Komisi V DPR RI meminta operator pengelola jasa transportasi nasional untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Untuk itu, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan POLRI untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh moda transportasi sesuai dengan kewenangannya.
3. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk mengantisipasi kondisi cuaca buruk dan bencana alam serta meningkatkan *response time* terhadap upaya pertolongan apabila terjadi keadaan darurat baik karena kecelakaan maupun karena kemacetan.
4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, dan Basarnas untuk melakukan peninjauan persiapan sarana dan prasarana transportasi Angkutan Lebaran 2017/1438 H.
5. Komisi V DPR RI sepakat untuk mengagendakan rapat evaluasi tentang penanganan arus mudik dan arus balik Lebaran segera setelah selesainya Operasi Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2017 /1438 H.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 8 Juni 2017

KETUA RAPAT,

FARY DJEMY FRANCIS

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO

KEPALA BMKG,


ANDLEKA SAKYA

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,



M. SYAUGI

MENTERI PERHUBUNGAN,



BUDI KARYA SUMADI

KAKORLANTAS POLRI,



ROYKE LUMOWA